

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh :

ALBINA DA SILVA DIAS

NIM : 2016110009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

sikap adil sangat dibutuhkan agar pelaku usaha untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena nilai keadilan sangat dijunjung tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan selalu meningkat dalam pembayaran pajak (A Mukoffi dan SH Wibisono, 2017:11-20). Pihak pemerintah sangat mempergunakan penerimaan yang bersumber dari pajak dengan baik yakni untuk mendukung pembangunan dan membiayai belanja pegawai serta mendukung berbagai macam infrastruktur untuk membangun sekolah maupun rumah sakit.

Maka dari itu, penerimaan yang bersumber dari pajak kontribusinya sangat besar apabila dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Dari berbagai aspek yang dilihat karena selalu meningkatnya penerimaan pajak untuk kas negara maka pemerintah sangat bijak untuk mengeluarkan berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan pajak.

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan dan pendapatan daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah. Permasalahan yang terjadi karena pendapatan bagi wajib pajak sangat rendah sedangkan nominal pemungutan pajak meningkat. ” sikap adil sangat dibutuhkan agar pelaku usaha untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena nilai keadilan sangat dijunjung tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan selalu meningkat dalam pembayaran pajak (A Mukoffi dan SH Wibisono, 2017:11-20). Pihak pemerintah sangat mempergunakan penerimaan yang bersumber dari pajak dengan baik yakni untuk mendukung pembangunan dan membiayai belanja pegawai serta mendukung berbagai macam infrastruktur untuk membangun sekolah maupun rumah sakit.

Maka dari itu, penerimaan yang bersumber dari pajak kontribusinya sangat besar apabila dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Dari berbagai aspek yang dilihat karena selalu meningkatnya penerimaan pajak untuk kas negara maka pemerintah sangat bijak untuk mengeluarkan berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan pajak.

Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mendorong kemajuan otonomi daerah dari berbagai macam sektor pusat maupun daerah menjadi lebih baik di tahun yang akan datang.

Adapun berbagai persoalan yang terjadi mengenai pembayaran pajak yakni: kurangnya rasa percaya antara pelaku pajak dengan pemerintah penerima pembayaran pajak, kebijakan yang tidak ketat membuat masyarakat tidak membayar pajak atau sangat rendah

angka penerimaan pajak, kurangnya komunikasi ataupun adanya kesenjangan antara realisasi dan anggaran penerimaan pajak hal ini yang disebabkan kurangnya membayar pajak.

Permasalahan ini yang membuat masyarakat untuk mencari alasan agar bisa menghindari dari apa yang harus dibayarkan yakni pajak. Pada sisi lain masyarakat tidak percaya kepada pemerintah karena tidak adanya transparansi dalam penerimaan pajak dari masyarakat. Hal ini masyarakat sangat membutuhkan penjelasan yang sangat detail tentang apa saja penggunaan keuangan yang bersumber dari pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Dilakukan penelitian ini harapan dari peneliti supaya bisa menambah referensi di perpustakaan kampus serta sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.
- b. Bagi Peneliti,
Sebagai penambahan ilmu khusus untuk penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan karena sangat banyak permasalahan yang terjadi di dunia nya kerja.
- c. Bagi Universitas,

Dijadikan sumber bacaan dengan teori terbaru Bagi siapapun ingin mengetahui kajian ini khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian dengan hal yang sama.

d. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Sebagai sumber yang dapat disaring agar bisa membuat aturan mengenai pajak daerah agar selalu meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mukoffi dan SH Wibisono. 2017. Pengaruh Nilai Keadilan Penerapan Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang. Jurnal: Ilmu Manajemen dan Akuntansi 4 (1) 11-20, April.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998, *tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998, *tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP*
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2013, Perpajakan, *Edisi Revisi 2013*, Yogyakarta: Andi.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta
- Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) Penelitian pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Siti Resmi, 2013, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekretaris *Negara Republik Indonesia*, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Tjahyono dan Fakhri (2005: 29): "*Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2016*".

